

## UPAYA PENGEMBANGAN INVESTASI IKM BORDIR DALAM MENINGKATKAN PAD KABUPATEN DEMAK

Caroline  
Teguh Pamudji  
Abdul Syakur

Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Fatah Demak

### ABSTRACT

*In exercising regional autonomy as mandated by Law No 32 Year 2004 on Regional Government and Law No 33 of 2004 on revenue sharing and central and local government Act No 28 of 2009 on local taxes and levies Third Law implies that a region vying to dig and search for sources of local revenue. Embroidery Demak needed short-term investment plans, medium-, and long consequences of regional autonomy is not easy, considering an area diuntut must find alternative sources of financing region One source of financing in Demak is the presence of developing SMEs Embroidery located in several districts in Demak, however, there are three centers of IKM is District Bonang, Wedung, and Wonosalam IKM development Short-term investment plans annual 5 USD 5.715 billion; 10-year medium-term IDR 38.432 billion; Long-Term IDR 15 years Rp 258.461 billion and 20 years 1,738,204,000,000. There are 5 dimensions HPI Embroidery Demak need to be developed, namely: Finance, Accounting, Review HR, Production and Marketing Process. By positioning strategy: Rapid Growth for Financial Dimension; Stable Growth for Dimension Bookkeeping; Selective Maintenance for Human Dimension; Turn around for Dimensional Marketing; Concentric Diversification of Production Process dimension.*

*Keywords : IKM Embroidery, Investment*

### PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah membawa konsekuensi agar masing-masing daerah berlomba-lomba mencari sumber pembiayaan daerahnya. Suatu daerah yang tidak mampu membiayai sumber pembiayaan daerah akan di merger (digabungkan) atau dihapuskan. Bahkan tidak menutup suatu daerah dapat juga dimekarkan wilayahnya.

Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang melaksanakan otonomi daerahnya. Kabupaten Demak

mempunyai luas wilayah 89 743 ha yang mencakup 14 Kecamatan, 243 Desa dan 6 Kelurahan, dengan jumlah penduduk 1.07.861 Jiwa (Demak Dalam Angka 2013), sangat potensial untuk mengembangkan investasi di bidang Industri Kecil Menengah Bordir. Kabupaten Demak memiliki 11 komoditas unggulan, yang diharapkan dapat membantu menumbuhkan perekonomian daerah, antara lain: (1) rokok; (2) jenang; (3) bordir, (4) gula merah; (5) kapuk; (6) produk dari kayu (meubel); (7) tekstil; (8) kerajinan bordir; (9) tas, dompet,

sabuk; (10) sepatu/sandal; dan (11) barang dari logam. Dari kesebelas komoditas unggulan tersebut, Bordir merupakan produk unggulan yang memperoleh perhatian secara khusus. Alasan yang melandasi perhatian terhadap bordir adalah adanya faktor historis, unique characteristics bordir Demak dibanding dengan lainnya, pangsa pasar, tingkat kebutuhan tenaga kerja, kontribusi terhadap pendapatan daerah serta banyaknya IKM Bordir yang memiliki potensi tinggi.

Diharapkan dengan adanya potensi IKM Bordir yang tinggi di Kabupaten Demak dapat menarik para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Demak. Kegiatan investasi merupakan faktor yang sangat penting untuk menggerakkan ekonomi daerah. Makin besar arus masuk investasi dapat menciptakan peluang munculnya kegiatan-kegiatan usaha yang lain. Implikasinya antara lain meningkatnya kesempatan kerja dan peluang terjadinya peningkatan PAD. Dengan kata lain bahwa investasi dapat menimbulkan *multiplier effect* bagi kemajuan ekonomi daerah. Manfaat penanaman modal langsung (*direct investment*) selain karena sifatnya jangka panjang juga terjadi adanya transformasi modal, penciptaan lapangan kerja, tranfer teknologi, akses ke pasar dunia dan transfer kemampuan manajerial.

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi, pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah dengan peningkatan program promosi dan pengembangan kerjasama regional, nasional maupun internasional. Dengan semakin mantap akan

dikembangkannya Kabupaten Demak sebagai kota bisnis melalui kegiatan perdagangan, industri dan pariwisata berskala nasional dan internasional, maka pemahaman yang lebih menyeluruh tentang arti penting pencapaian tujuan pembangunan daerah perlu dikembangkan dan dijadikan dasar pengembangan investasi.

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk memperbaiki iklim investasi merupakan faktor penentu bagi kesinambungan pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Langkah nyata perbaikan iklim investasi sangat diperlukan guna menjaga persepsi positif pelaku ekonomi dan usaha. Secara umum arah kebijakan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup rakyat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat serta mendorong agar pertumbuhan ekonomi selalu berkelanjutan. Tujuan yang ingin dicapai ini mengandung konsekuensi bahwa penggalan potensi-potensi yang terdapat di daerah senantiasa dilakukan untuk mendorong tumbuhnya investasi baru yang dapat menstimulus perekonomian ke arah yang lebih maju.

## TELAAH PUSTAKA

### Skala Usaha

Skala usaha dikelompokkan atas Usaha Besar, Usaha Sedang, Usaha Kecil dan Usaha Rumah Tangga. Usaha Besar merupakan usaha yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, Usaha Sedang memiliki tenaga kerja antara 20 sampai 99 orang, Usaha Kecil memiliki tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang, dan Usaha Rumah Tangga adalah usaha

dengan tenaga kerja antara 1 sampai 4 orang (Jawa Tengah dalam Angka, 2013). Sedangkan berdasarkan Kesepakatan Bersama (KB) Antara Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Gubernur Bank Indonesia tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah No:15/KEP/MENKO/KESRA/VI/2005 No7/31/KEP.GBI/ 2005 terdapat ketentuan sbb.:

1. Usaha Kecil adalah Usaha yang memenuhi kriteria sbb:
  - a. Usaha produktif milik Warga Negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbentuk hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi;
  - b. Bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; dan
  - c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan maksimum Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) pertahun
2. Usaha Menengah adalah usaha produktif yang berskala menengah dan memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,- di luar tanah dan bangunan tempat usaha yang

memiliki hasil penjualan maksimum Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pertahun sebagaimana dimaksud dalam instruksi Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 1999 tentang pemberdayaan Usaha Menengah.

Berikutnya ada undang-undang baru tentang UMKM, yang diterbitkan pada tgl. 4 Juli 2008, yaitu UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008. Pada Bab IV Pasal 6 KRITERIA berisi sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan

paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

### Investasi

Investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan di masa mendatang. Dalam investasi tercakup 2 (dua) tujuan utama, yakni untuk mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak (depresiasi), dan tambahan penyediaan modal yang ada atau investasi netto (Lewis, 1993). Para pelaku investasi adalah: 1) Pemerintah; 2) Swasta; dan 3) Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta. Investasi pemerintah pada umumnya dilakukan tidak dengan maksud mencari keuntungan, tetapi tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat (nasional) namun ada juga yang menyebutnya investasi yang timbul bukan karena adanya tambahan pendapatan (Sobri 1987: 145).

Teori investasi pada dasarnya menjelaskan bagaimana proses pembuatan keputusan dilakukan oleh calon penanam modal untuk memilih jenis dan besar proyek yang akan diambil. Dalam hal ini diasumsikan bahwa bidang Industri Kecil Menengah Bordir.

Kabupaten Demak memiliki 11 komoditas unggulan, yang diharapkan dapat membantu menumbuhkan perekonomian daerah, antara lain: (1) rokok; (2) jenang; (3) bordir, (4) gula

merah; (5) kapuk; (6) produk dari kayu (meubel); (7) tekstil; (8) kerajinan bordir; (9) tas, dompet, sabuk; (10) sepatu/sandal; dan (11) barang dari logam. Dari kesebelas komoditas unggulan tersebut, Bordir merupakan produk unggulan yang memperoleh perhatian secara khusus. Alasan yang melandasi perhatian terhadap bordir adalah adanya faktor historis, unique characteristics bordir Demak dibanding dengan lainnya, pangsa pasar, tingkat kebutuhan tenaga kerja, kontribusi terhadap pendapatan daerah serta banyaknya IKM Bordir yang memiliki potensi tinggi.

Diharapkan dengan adanya potensi IKM Bordir yang tinggi di Kabupaten Demak dapat menarik para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Demak. Kegiatan investasi merupakan faktor yang sangat penting untuk menggerakkan ekonomi daerah. Makin besar arus masuk investasi dapat menciptakan peluang munculnya kegiatan-kegiatan usaha yang lain. Implikasinya antara lain meningkatnya kesempatan kerja dan peluang terjadinya peningkatan PAD. Dengan kata lain bahwa investasi dapat menimbulkan *multiplier effect* bagi kemajuan ekonomi daerah. Manfaat penanaman modal langsung (*direct investment*) selain karena sifatnya jangka panjang juga terjadi adanya tranformasi modal, penciptaan lapangan kerja, tranfer teknologi, akses ke pasar dunia dan transfer kemampuan manajerial.

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi, pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah dengan peningkatan program promosi dan

pengembangan kerjasama regional, nasional maupun internasional. Dengan semakin mantap akan dikembangkannya Kabupaten Demak sebagai kota bisnis melalui kegiatan perdagangan, industri dan pariwisata berskala nasional dan internasional, maka pemahaman yang lebih menyeluruh tentang arti penting pencapaian tujuan pembangunan daerah perlu dikembangkan dan dijadikan dasar pengembangan investasi.

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk memperbaiki iklim investasi merupakan faktor penentu bagi kesinambungan pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Langkah nyata perbaikan iklim investasi sangat diperlukan guna menjaga persepsi positif pelaku ekonomi dan usaha. Secara umum arah kebijakan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup rakyat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat serta mendorong agar pertumbuhan ekonomi selalu berkelanjutan. Tujuan yang ingin dicapai ini mengandung konsekuensi bahwa penggalian potensi-potensi yang terdapat di daerah senantiasa dilakukan untuk mendorong tumbuhnya investasi baru yang dapat menstimulus perekonomian ke arah yang lebih maju.

## TELAAH PUSTAKA

### Skala Usaha

Skala usaha dikelompokkan atas Usaha Besar, Usaha Sedang, Usaha Kecil dan Usaha Rumah Tangga. Usaha Besar merupakan usaha yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, Usaha Sedang memiliki tenaga kerja antara 20 sampai 99

orang, Usaha Kecil memiliki tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang, dan Usaha Rumah Tangga adalah usaha dengan tenaga kerja antara 1 sampai 4 orang (Jawa Tengah dalam Angka, 2007). Sedangkan berdasarkan Kesepakatan Bersama (KB) Antara Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Gubernur Bank Indonesia tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah No:15/KEP/MENKO/KESRA/VI/2005 dan No7/31/KEP.GBI/2005 terdapat ketentuan sbb.

1. Usaha Kecil adalah Usaha yang memenuhi kriteria sbb.:
  - a. Usaha produktif milik Warga Negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbentuk hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi;
  - b. Bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; dan
  - c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan maksimum Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) pertahun
2. Usaha Menengah adalah usaha produktif yang berskala menengah dan memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari

Rp.200.000.000,- di luar tanah dan bangunan tempat usaha yang memiliki hasil penjualan maksimum Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pertahun sebagaimana dimaksud dalam instruksi Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 1999 tentang pemberdayaan Usaha Menengah.

Berikutnya ada undang-undang baru tentang UMKM, yang diterbitkan pada tgl. 4 Juli 2008, yaitu UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008. Pada Bab IV Pasal 6 KRITERIA berisi sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

### **Investasi**

Investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan di masa mendatang. Dalam investasi tercakup 2 (dua) tujuan utama, yakni untuk mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak (depresiasi), dan tambahan penyediaan modal yang ada atau investasi netto (Lewis, 1993). Para pelaku investasi adalah: 1) Pemerintah; 2) Swasta; dan 3) Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta. Investasi pemerintah pada umumnya dilakukan tidak dengan maksud mencari keuntungan, tetapi tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat (nasional) namun ada juga yang menyebutnya investasi yang timbul bukan karena adanya tambahan pendapatan (Sobri 1987: 145).

Teori investasi pada dasarnya menjelaskan bagaimana proses pembuatan keputusan dilakukan oleh calon penanam modal untuk memilih jenis dan besar proyek yang akan diambil. Dalam hal ini diasumsikan bahwa keputusan yang diambil oleh calon penanam modal dipengaruhi oleh tingkat bunga (interest rate).

Investasi merupakan usaha menanamkan faktor-faktor produksi langka dalam proyek-proyek tertentu. Proyek dapat bersifat baru sama sekali maupun berupa perluasan proyek yang sudah ada.

Tujuan utama investasi adalah memperoleh berbagai macam manfaat yang layak di kemudian hari. Manfaat tersebut dapat berupa imbalan keuangan, non keuangan, atau kombinasi keduanya. Manfaat non-keuangan misalnya penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan ekspor, substitusi impor, atau pemanfaatan bahan baku dalam negeri yang melimpah.

### Sumber pembiayaan Investasi

#### I. Sumber Konvensional (UU 33 Tahun 2004)

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah pasal 5 disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
  - a. Hasil Pajak Daerah;
  - b. Hasil Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah
2. Dana Perimbangan
  - a. Dana Bagi Hasil yang terdiri dari:
    - 1) Pajak: Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan, Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri.

- 2) Penerimaan dari Sumber Daya Alam:
  - a) Kehutanan
  - b) Pertambangan Umum
  - c) Perikanan
  - d) Pertambangan Minyak Bumi
  - e) Pertambangan Gas Bumi
  - f) Pertambangan Panas Bumi.
  - g) Dana Alokasi Umum; dan
  - h) Dana Alokasi Khusus;
- 3) Lain-lain Pendapatan:
  - a) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan
  - b) Jasa Giro
  - c) Pendapatan Bunga
  - d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
  - e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang/jasa oleh daerah.

Pembiayaan daerah bersumber dari :

- a. Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah
- c. Dana Cadangan Daerah

- d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

## II. Sumber Pembiayaan Non Konvensional

1. Sumber pembiayaan melalui pendapatan (*Revenue Financing*) berasal:

- a. Pendapatan Pemerintah melalui pungutan perbaikan (*Betterment Levies*)  
Pungutan perbaikan merupakan tagihan modal yang ditujukan untuk menutupi atau membiayai biaya modal dari investasi prasarana. Hal ini dapat dikenakan pada suatu kawasan dimana biaya peningkatan mutu lingkungan hidup langsung dibebankan pada nilai tanah. Perbaikan mutu lingkungan hidup mencakup antara lain: pembuatan trotoar, jalan besar, saluran air limbah dan taman-taman.
- b. Pendapatan Swasta (*Private Revenue Financing*)  
Bentuk dari ini diantaranya adalah biaya dampak pembangunan (*Development Impact Fees*) dan Biaya Sambungan (*Connection Fees*) contohnya: air bersih, telepon dan pembuangan kotoran, yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh perusahaan jasa pelayanan kepada individu.
- c. Pendapatan Pemerintah Swasta  
Salah satu bentuknya adalah konsolidasi lahan. Konsolidasi lahan merupakan suatu usaha

pengaturan kembali pemilikan lahan dengan tujuan agar penggunaan lahan akan menjadi lebih baik dan optimal dalam pengertian kelestarian, pemanfaatan dan produktivitas. Sasaran konsolidasi lahan adalah melalui pemberian sertifikat kepada pemilik lahan, sehingga dapat memberikan masukan kepada pajak bumi dan bangunan (PBB).

2. Sumber pembiayaan melalui hutang (*Debt Financing*)

- a. Hutang Pemerintah melalui obligasi.  
Pasal 79 dan 81 UU No. 22 Tahun 1999 dan pasal 3 UU No. 25 Tahun 1999 ditegaskan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dalam rangka pembiayaan daerahnya tanpa meminta persetujuan dahulu dari pusat. Pinjaman yang dimaksud untuk pembiayaan pembangunan seperti infrastruktur.
- b. Hutang swasta melalui *Development Exactions* (DE).  
*Development Exactions* dikenakan pada developer dalam rangka pembangunan prasarana dalam lingkungan area pembangunan, sebagai salah satu syarat pembangunan dimulai, seperti jalan, saluran air bersih, saluran air kotor, dll. Besarnya pungutan pada DE berdasarkan negosiasi antara developer

- dengan institusi yang mewakili aktivitas yang bersangkutan. Keuntungan DE adalah tidak ada biaya konstruksi yang ditanggung.
- c. Hutang Swasta-Pemerintah melalui: *Excess Comdemnation* dan *Linkage*
    - i. *Excess Comdemnation* merupakan metode pembiayaan prasarana secara tidak langsung dimana sejumlah tanah disisihkan untuk pembangunan prasarana dan sejumlah lainnya diberikan kepada developer swasta untuk pembangunan komersial.
    - ii. *Linkage* Pendekatan yang bersifat langsung, developer diharuskan menyediakan dan membiayai prasarana yang sejenis di daerah lain yang kurang diinginkan dalam rangka mendapatkan persetujuan pembangunan. Contoh membangun RSS untuk membangun rumah mewah.
  3. Sumber pembiayaan melalui kekayaan Swasta-Pemerintah
    - a. Usaha Patungan (*Joint Venture*) *Joint Venture* merupakan kerjasama antara swasta dan pemerintah, dimana masing-masing pihak mempunyai posisi yang seimbang dalam perusahaan yang bersangkutan. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah memadukan keunggulan pihak swasta seperti modal, teknologi dan kemampuan manajemen, dengan keunggulan dari pemerintah seperti sumber-sumber, kewenangan dan kepercayaan masyarakat.
    - b. BOT (*Built, Operation, Transfer*) BOT merupakan salah satu bentuk konsesi antara swasta dengan pemerintah. BOT atau bangun, guna, serah dengan pengertian swasta membangun, mengoperasikan dan memperoleh pendapatan dari suatu fasilitas dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. setelah masa konsesi, fasilitas atau insfastruktur yang dibangun dan dioperasikan diserahkan kepada pemerintah.
    - c. BOO (*Built, Own, Operate*) Swasta investor yang membangun di atas tanah milik pemerintah daerah, setelah proyek langsung dihibahkan kepada pemerintah daerah dan investor dapat mengoperasikan dalam jangka waktu tertentu

**Tabel 1**  
**Sumber Pembiayaan Non Konvensional**

<b>Instrumen</b> <b>Aktor Pembangunan</b>	<b>Kekayaan</b>	<b>Hutang</b>	<b>Pendapapatan</b>
<b>Pemerintah</b>	Lahan Bangunan	Obligasi	Batterment Levis
<b>Swasta</b>		Development Exaction	Biaya dampak pembangunan , dampak sambungan
<b>Pemerintah &amp; Swasta</b>	Joint Venture, Konsesi, (BOO,BOT,Leasing)	Excess Comdemnation Linkage	Konsolidasi Lahan

### **METODE PENELITIAN**

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dalam dua cara, yaitu survei instansional dan pengamatan lapangan. Survei instansional dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder, baik data-data numerik maupun data-data (dokumen) kebijakan dan peraturan-peraturan yang terkait.

Sedangkan Pengamatan lapangan dilakukan terutama untuk pengecekan ulang (*cross-check*) data sekunder dengan fakta-fakta yang terjadi. Kegiatan terutama difokuskan untuk mengetahui komoditas wilayah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan.

#### **Alat Analisis**

Alat yang digunakan adalah analisis deskriptif pembiayaan daerah, *Location Quotient*, analisis trend SWOT analysis.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Jumlah Penduduk Kabupaten Demak**

Penduduk Kabupaten Demak mayoritas berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 543.640 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk laki-lakinya sebanyak 536.221 jiwa. Penduduk yang padat berada di Kecamatan Mranggen 161.675 jiwa, sedangkan penduduk yang jumlahnya paling sedikit berada di Kecamatan Gajah 44.332 jiwa (Demak Dalam Angka 2013). Laju pertumbuhan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Mijen, sedangkan jumlah penduduk di Kecamatan Wedung mengalami penurunan 0,2 persen. Hal ini bisa disebabkan adanya jumlah penduduk Kecamatan Wedung yang bekerja keluar daerah, ataupun adanya tingkat kematiannyang cukup tinggi. Data jumlah penduduk di Kabupaten Demak angkanya sama seperti jumlah penduduk 2013.

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Demak**  
**Tahun 2012-2013**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Laju Pertumbuhan Penduduk</b>
1	Mranggen	158.882	161.675	1,8

2	Karangawen	84.193	85.398	0,8
3	Guntur	72.551	73.063	0,3
4	Sayung	98.907	99.443	0,1
5	Karangsambung	59.425	99.443	0,1
6	Bonang	96.292	99.585	0,1
7	Demak	98.511	72.200	0,7
8	Wonosalam	71.761	52.030	0,3
9	Dempet	51.458	44.332	0,4
10	Gajah	43.452	69.324	0,6
11	Karanganyar	68.650	57.843	0,4
12	Mijen	50.426	71.089	4,7
13	Wedung	71.469	38.162	(0,2)
14	Kebonagung	37.791	85.398	0,2
<b>Jumlah</b>		<b>1.063.768</b>	<b>1.079.861</b>	<b>10,1</b>

Sumber : Demak dalam Angka 2012-2013

#### Jumlah Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Demak

Angka ketergantungan penduduk usia non produktif (usia 0 - 14 dan usia lebih dari 65 tahun) terhadap usia produktif (usia 15 - 64) yaitu 47,86 artinya satu orang usia produktif menanggung kurang lebih 47 orang non produktif. Penduduk pada usia produktif sangat efektif dalam mengembangkan usaha, yaitu salah satunya Industri Kecil

Menengah Bordir yang berada di Kabupaten Demak. Diharapkan dengan adanya *Dependency Ratio* yang tinggi di Kecamatan Wedung, Gajah, Dempet, Karangsambung, Karangawen, Mijen dapat berkembang, sehingga dapat menopang perekonomian keluarga pada khususnya dan meningkatkan pendapatan bagi Kabupaten Demak.

**Tabel 3**  
**Jumlah Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2013**

No	Kecamatan	Usia			<i>Dependency Ratio</i>
		(0-14)	(15-64)	(65+)	
1	Mranggen	43.625	110.671	7.379	46,09
2	Karangawen	22.387	58.205	4.806	46,72
3	Guntur	19.982	48.986	4.095	49,15
4	Sayung	26.340	68.684	4.069	44,27
5	Karangsambung	16.142	40.621	2.861	46,78
6	Bonang	26.816	64.884	4.743	48,64
7	Demak	25.734	68.110	5.741	46,21
8	Wonosalam	19.501	48.625	4.074	48,48
9	Dempet	13.645	34.942	3.443	48,9
10	Gajah	11.711	29.468	3.153	50,44
11	Karanganyar	18.456	46.659	4.209	48,58

12	Mijen	14.858	38.910	4.075	48,66
13	Wedung	20.836	45.725	4.528	55,47
14	Kebonagung	9.869	25.856	2.437	47,59
<b>Jumlah</b>		<b>289.902</b>	<b>730.346</b>	<b>59.613</b>	<b>47,86</b>

### Jumlah Tamatan Pendidikan dari Penduduk Kabupaten Demak

Penduduk Kabupaten Demak mayoritas lulusan SD/ MI Sederajat sebesar 35,78 persen. Penduduk lulusan SMA/MA/ sederajat jumlahnya masih sedikit 12,50 persen. Lulusan Sekolah Menengah kejuruan hanya 2,55 persen. Sedangkan lulusan Diploma I/II/III/IV/Akademi/Diploma IV/ S1/S2/S3 jumlah totalnya 4,21 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Kabupaten Demak

belum menjadi prioritas utama dalam membangun manusianya. Dengan sumber daya manusia yang minim, maka tenaga kerja di Kabupaten Demak paling banyak bekerja di sektor informal. Dimana tidak banyak membutuhkan pendidikan tinggi melainkan membutuhkan ketrampilan dan keahlian saja. Diharapkan dengan tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan keahlian dapat mengembangkan IKM Bordir di Kabupaten Demak.

**Tabel 4**  
**Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang memiliki ijazah Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2013**

No	Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	Laki laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	Belum pernah sekolah	7.880	43.672	51.553	5,94
2	Tidak punya ijazah	75.712	78.843	154.555	17,80
3	SD/MI sederajat	150.221	160.439	310.000	35,78
4	SMP/MTs/ sederajat	91.798	92.494	184.292	21,23
5	SM Kejuruan	61.368	47.204	108.572	12,50
6	SM Kejuruan	14.736	7.391	22.127	13,50
7	Diploma I/II	710	2.646	3.356	2,55
8	Diploma III/ Akademi	3.737	4.989	8.726	0,39
9	Diploma IV/ S1/S2/S3	14.656	9.734	24.390	1,01
<b>Jumlah</b>		<b>420.818</b>	<b>447.412</b>	<b>868.230</b>	<b>2,81</b>

### Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak

Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Demak terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya. PAD Kabupaten Demak tahun 2012 meningkat dari tahun sebelumnya. Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar pada

PAD Kabupaten Demak. Kemudian disusul oleh pendapatan lainnya. Pendapatan dari investasi IKM Bordir di Kabupaten Demak ikut membantu dalam memberikan pendapatan Kabupaten Demak. Dengan meningkatnya penghasilan IKM Bordir di Kabupaten Demak, akan meningkatkan pendapatan bagi Kabupaten Demak

**Tabel 5**  
**Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli**  
**Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2012-2013**  
**(Dalam Ribuan Rupiah)**

No.	PAD	2012			2013		
		Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
1.	Pajak Daerah	68.555.957	74.559.137	108,76	8.032.015	105.354.370	135,01
2.	Retribusi Daerah	21.950.048	24.450.790	111,39	23.553.782	31.742.813	134,77
3.	Pendapatan daerah yang dipisahkan	4.795.153	4.795.898	100,02	884.402	10.552.37	121,19
4.	Pendapatan Lainnya	31.571.339	34.232.298	108,43	33.980.000	48.386.849	142,40

#### **Analisis Sektor Basis (LQ)**

Terkait dengan aliran pergerakan barang dan jasa intra serta inter Kabupaten, pada bagian ini terlebih dahulu akan dilakukan identifikasi sektor strategis yang diarahkan untuk mengetahui sektor-sektor yang memiliki keunggulan untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Demak, dilihat dari potensi, penciptaan pendapatan dan lapangan kerja, maupun interaksinya dengan sektor-sektor lain di dalam dan luar daerah sehingga dapat diketahui sektor yang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat di dalam wilayah Kabupaten Demak sendiri dan berpotensi untuk bergerak ke luar wilayah.

Untuk mengetahui spesifikasi relatif sektor atau kegiatan ekonomi tertentu di suatu wilayah perencanaan, maka dapat digunakan Metode Location Quatien (LQ). Variabel pengukuran yang digunakan disini untuk melihat sektor basis wilayah, dimana untuk melihat komoditas yang berpotensi

mendukung pengembangan wilayah adalah variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah perencanaan Kabupaten Demak dan PDRB daerah acuan, yang dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Tengah. Kriteria umum yang digunakan dalam penentuan sektor basis dengan metode LQ:

- Jika  $LQ > 1$  disebut sektor basis, yaitu sektor yang spesialisasinya lebih besar daripada tingkat wilayah acuannya.
- Jika  $LQ < 1$  disebut sector nonbasis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih kecil daripada tingkat wilayah acuan.

#### **Analisis perhitungan LQ di Kabupaten**

Demak dihitung berdasarkan PDRB Kabupaten Demak dibandingkan dengan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa sektor ekonomi di Kabupaten Demak yang menjadi sektor basis.

**Tabel 6**  
**Sektor Potensial Di Kabupaten Demak Tahun 2013**

No	Sektor Potensial	LQ
1.	Industri	1,29
2.	Pertanian	1,02
3.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,00

Sumber : Data Demak Dalam Angka 2013; Jawa Tengah Dalam Angka 2013

Sektor basis yang ini terbukti dengan *Location Quotient* merupakan sektor potensial yang (LQ) sektor industri di Kabupaten dikembangkan di Kabupaten Demak menunjukkan nilai 1,29. Demak adalah sektor Industri. Hal

**Tabel 7**  
**Sektor yang Harus dikembangkan Di Kabupaten Demak Tahun 2013**

No	Sektor	LQ
1	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,34
2	Bangunan	0,32
3	Pengangkutan dan Komunikasi	0,26
4	Jasa-jasa	0,20
5	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,06
6	SM Kejuruan	0,03

Sumber : Data Demak Dalam Angka 2013; Jawa Tengah Dalam Angka 2013,

Sektor yang harus dikembangkan di Kabupaten Demak adalah sektor pertanian (1,02) dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (1,00). Sedangkan sektor yang harus dikembangkan potensinya adalah sektor : Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (0,34); Bangunan (0,32); Pengangkutan dan Komunikasi (0,26); Jasa-jasa (0,20); Listrik, Gas dan Air Bersih (0,06); Pertambangan dan Penggalan (0,03).

#### **IKM Kabupaten Demak**

Industri Kecil Menengah (IKM) yang berkembang di Kabupaten Demak adalah industri pengolahan kayu 371 buah dan industri batu merah 284 buah, industri bordir 100 buah, industri kasur/bantal 44 buah dan industri genting 20 buah.

**Tabel 8**  
**Industri Kecil Menengah di Kabupaten Demak Tahun 2013**

No	Kecamatan	Kasur/ Bantal	Pakaian/ Konveksi	Pengolahan kayu	Genting	Batu Merah
1	Mranggen	-	13	257	16	200
2	Karangawen	-	3	12	4	60
3	Guntur	-	2	6	-	11
4	Sayung	-	2	23	-	-
5	Karantengah	-	4	7	-	5

6	Bonang	-	1	4	-	-
7	Demak	-	26	31	-	-
8	Wonosalam	-	4	13	-	-
9	Dempet	-	-	4	-	-
10	Gajah	-	5	5	-	-
11	Karanganyar	-	-	1	-	-
12	Mijen	44	22	3	-	8
13	Wedung	-	7	4	-	-
14	Kebonagung	-	3	1	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>	<b>92</b>	<b>371</b>	<b>20</b>	<b>284</b>

Sumber : Demak dalam angka 2013

IKM pakaian dan konveksi tersentral di 12 Kecamatan yaitu : Demak, Mijen, Mranggen, Wedung, Gajah, Karangtengah, Keboanagung, Karangawen, Guntur, Sayung dan Bonang.

#### **IKM Bordir Kabupaten Demak**

IKM Bordir di Kabupaten Demak sentranya di Kecamatan Wedung, Wonosalam dan Bonang. Kecamatan Wedung ada 27 sentra IKM Bordir; Kecamatan Wedung 8 sentra IKM Bordir, dan yang terbanyak di Kecamatan Bonang ada 65 sentra IKM Bordir.

**Tabel 9**  
**Industri Kecil Menengah di Kabupaten Demak Tahun 2012**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Desa	Total
1	Wedung	Desa Buko	1	27
		Desa Jetak	2	
		Desa Jungpasir	14	
		Desa Mutihkulon	2	
		Desa Mutihwetan	1	
		Desa Ngawen	2	
		Desa Tedunan	4	
		Desa Wedung	1	
2	Wonosalam	Desa Wonosalam	8	8
3	Bonang	Desa Betahlawang	1	65
		Desa Jatimulyo	1	
		Desa Jatirogo	1	
		Desa Karangrejo	11	
		Desa Kembangan	11	
		Desa Morodemak	8	
		Desa Poncoharjo	2	
		Desa Purworejo	14	
		Desa Serangan	9	
		Desa Sumburejo	2	
		Desa Weding	4	
		Desa Wonosari	1	
<b>Jumlah IKM Bordir</b>			<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Disperindag, Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak

Mayoritas penduduk di Kecamatan Bonang bermata pencaharian sebagai pembordir pakaian, kerudung, mukena. Desa yang berpotensi IKM sentra Bordir di Kecamatan Bonang antara lain : Desa Purworejo (14), Desa Kembangan dan Desa Karangrejo masing- masing 11 sentra, Desa Serangan (11), Desa Morodemak (8), Desa Weding (4), dan Desa yang hanya memiliki 1 sentra antara lain : Desa Betahlawang, Desa Jatimulyo, Desa Jatirogo, Desa Wonosari.

#### Identitas Responden

Berdasarkan hasil survey lapangan di Kecamatan Bonang, Kecamatan Wedung dan Kecamatan Wonosalam diperoleh informasi bahwa jumlah tenaga kerja pembordir yang berusia kurang dari 31 tahun adalah lulusan SMP/SMA/MTS/MI yang putus sekolah, karena keterbatasan ekonomi orangtuanya, maka setelah lulus bekerja sebagai pembordir pakaian, mukena, dan lain-lain. Tenaga kerja pembordir yang jumlahnya sedikit adalah mereka yang berusia di atas 50 tahun. Bagi mereka yang berusia lanjut enggan untuk menjadi pembordir karena adanya keterbatasan penglihatan dan

ketahanan fisik mereka dalam bekerja yang menuntut mereka untuk ketahanan fisik mereka dalam bekerja kbekerja teliti dan rapi dalam yang menuntut mereka untuk membordir.

**Tabel 10**  
**Identitas Umur Responden**

No	Umur	Jumlah Responden
1	< 31 Tahun	11
2	31 – 40 Tahun	23
3	41 – 50 Tahun	48
4	>50 Tahun	12
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>

Sumber : Hasil Wawancara Kuesioner,2014

Pekerja terbanyak dari mereka yang tidak lulus bangku sekolah. Untuk menghidupi keluarganya mereka bekerja sebagai pembordir. Minoritas bagi mereka yang telah lulus SMA/MI jarang bekerja sebagai pembordir, karena mereka lebih memilih bekerja di Pabrik Besar atau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

**Tabel 11**  
**Identitas Tamat Pendidikan Responden**

No	Tamat Pendidikan	Jumlah
1	SMP/MTS	27
2	SMA/MI	5
3	Tidak Lulus Bangku Sekolah	68
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>

Sumber : Hasil Wawancara Kuesioner,2014

Pekerja kebanyakan dari mereka yang tidak berpengalaman dalam membordir. Dari jumlah responden 100 orang sebanyak 53 orang yang tidak berpengalaman, dan sisanya 47 orang saja yang berpengalaman dalam membordir.

**Tabel 12**  
**Pengalaman Kerja sebagai Pembordir**

No	Pengalaman	Jumlah Responden
1	Tidak Berpengalaman	53
2	Berpengalaman	47
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>

Sumber : Hasil Wawancara Kuesioner,2014

#### **Jumlah Investasi Awal IKM**

Jumlah investasi awal yang IKM Bordir keluarkan minimum 1 juta rupiah, seangkan jumlah investasi awal yang dikeluarkan oleh IKM

Bordir maksimum 250 juta rupiah. Mayoritas IKM banyak mengeluarkan modal untuk investasi awal 20 juta, sedangkan untuk minoritas antara 1

juta; 3,5 juta; 100 juta, bahkan ada yang 250 juta.

**Tabel 13**  
**Investasi IKM Bordir Kecamatan Wedung, Wonosalam, Bonang Tahun 2014**

No	Investasi Awal	IKM Bordir
1	1 Juta	1
2	1,5 Juta	10
3	2 Juta	8
4	2,5 Juta	12
5	3 Juta	8
6	3,5 Juta	1
7	4 Juta	2
8	5 Juta	11
9	9 Juta	3
10	9,5 Juta	2
11	10 Juta	6
12	11 Juta	3
13	13 Juta	4
14	20 Juta	13
15	25 Juta	2
16	27 Juta	2
17	28 Juta	4
18	30 Juta	2
19	35 Juta	4
20	100 Juta	1
21	250 Juta	1
<b>Jumlah Responden</b>		<b>100</b>

Sumber : Hasil Wawancara Kuesioner,2014

#### Tenaga Kerja yang Dikaryakan

Hasil survey yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang dikaryakan pada IKM Bordir mayoritas berjumlah 2 orang pekerja, sedangkan minoritas 10 orang pekerja

**Tabel 14**  
**Tenaga Kerja yang di Karyakan pada IKM Bordir Kabupaten Demak, Tahun 2014**

No	Umur	Jumlah Responden
1	1 Orang	12
2	2 Orang	64
3	3 Orang	13
4	4 Orang	5
5	5 Orang	4
6	10 Orang	2
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>

Sumber : Hasil Wawancara Kuesioner,2014

#### Kapasitas Produksi Bordir

Kapasitas produksi dari sentra bordir yang tersebar di Kecamatan Bonang, Kecamatan Wedung dan Kecamatan Wonosalam mayoritas 1.200 potong per tahun; sedangkan minoritas kapasitas produksi tertinggi 45.000 potong dan 60.000 potong per tahun.

**Tabel 15**  
**Identitas Umur Responden**

No	Kapasitas Produksi Bordir yang dihasilkan	IKM Bordir
1	600 potong	18
2	900 potong	6
3	1.000 potong	7
4	1.200 potong	35
5	1.300 potong	8
6	1.400 potong	5
7	2.100 potong	9
8	2.400 potong	2
9	3.000 potong	8
10	45.000 potong	1
11	60.000 potong	1
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>

Sumber : Hasil Wawancara Kuesioner,2014

#### Penggunaan Mesin

Hampir sebagian besar penggunaan mesin dalam membuat bordir adalah mesin jahit juki (mesin jahit dengan menggunakan listrik)

yaitu 61 persen dari 100 IKM di Kabupaten Demak, sisanya 37 persen menggunakan mesin jahit manual dan 2 pesen lainnya menggunakan mesin dengan teknologi canggih.

Hasil bordir yang terbaik, halus, kuat dan tahan lama jika pembuatan bordir dengan menggunakan mesin manual, namun dari sisi harga bordiran isik atau hasil mesin manual lebih mahal harganya, jika dibandingkan dengan bordir mesin juki atau mesin teknologi canggih. Bordir dengan menggunakan teknologi canggih digunakan pada pakaian/korudung/konveksi yang modifikasi, dimana dalam menggambar dan mencetak menggunakan mesin jahit teknologi tinggi yang dikaitan dengan komputer.

**Tabel 16**  
**Penggunaan Mesin dalam IKM**  
**Bordir**  
**Kabupaten Demak Tahun 2014**  
**(Persentase)**

No	Umur	Jumlah Responden
1	Isik /Mesin Manual	37
2	Mesin Juki	61
3	Komputer Plus Mesin Teknologi	2
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>

Sumber : Hasil Wawancara Kuesioner,2014

### Penggunaan Mesin

Hampir sebagian besar penggunaan mesin dalam membuat

bordir adalah mesin jahit juki (mesin jahit dengan menggunakan listrik) yaitu 61 persen dari 100 IKM di Kabupaten Demak, sisanya 37 persen menggunakan mesin jahit manual dan 2 pesen lainnya menggunakan mesin dengan teknologi canggih.

Hasil bordir yang terbaik, halus, kuat dan tahan lama jika pembuatan bordir dengan menggunakan mesin manual, namun dari sisi harga bordiran isik atau hasil mesin manual lebih mahal harganya, jika dibandingkan dengan bordir mesin juki atau mesin teknologi canggih. Bordir dengan menggunakan teknologi canggih digunakan pada pakaian/korudung/konveksi yang modifikasi, dimana dalam menggambar dan mencetak menggunakan mesin jahit teknologi tinggi yang dikaitan dengan komputer.

**Tabel 17**  
**Rencana Investasi IKM Bordir**  
**Kabupaten Demak**  
**(Rupiah)**

Tahun	Tahun ke	Jumlah Responden
2013	0	1.244.000.000
2017	5	5.715.000.000
2022	10	38.432.000.000
2027	15	258.461.000.000
2032	20	1.738.204.000.00

Sumber : Hasil Analisis Data Sekunder dan Primer

### Hasil Kuesioner

Dari hasil survey di lapangan via kuesioner pada 100 IKM di Kabupaten Demak, maka diperoleh hasil skoring sebagai berikut :

**Tabel 18**  
**Skoring Hasil Kuesione dengan berbagai Dimensi**

Dimensi	SKORING				Total
	SB	B	C	K	

1. KEUANGAN		4	3	2	1	
1	Pemenuhan dana dari modal sendiri	13	27	35	25	100
2	Akses perbankan & Bank cable	7	11	19	63	100
3	Kemampuan mengembalikan angsuran pinjaman	21	18	30	31	100
4	Rasio pinjaman dengan modal sendiri	17	23	37	23	100
5	Rasio pinjaman dengan asset yang dimiliki	13	28	36	23	100
6	Margin kontribusi	7	26	44	23	100
7	Pertumbuhan laba	14	34	44	8	100
8	Kemampuan memenuhi modal kerja (likuiditas)	8	21	29	42	100
9	Profitabilitas	8	11	20	61	100
10	Akses sumber dana murah lainnya	11	18	26	45	100
2. PEMBUKUAN						
11	Kemampuan membuat buku kas harian	8	17	52	23	100
12	Kemampuan membuat catatan persediaan	9	17	62	12	100
13	Kemampuan menyusun peredaran kekayaan	5	14	33	46	100
14	Kemampuan membuat kalkulasi harga pokok produk	2	17	39	42	100
15	Kemampuan menyusun kalkulasi harga pokok penjualan dan harga jual	3	21	39	37	100
16	Kelengkapan bukti transaksi	5	23	41	31	100
17	Membuat laporan/norma hitung	8	9	35	48	100
18	Ber-NPWP	-	-	78	22	100
19	Ijin Usaha	-	23	69	8	100
20	Membuat estimasi biaya produksi	2	37	40	21	100
21	Catatan penjualan	18	34	43	5	100
3. KEPERSONALIAAN						
22	Jumlah pegawai mencukupi	3	11	35	51	100
23	Pembukuan kepegawaian	2	13	44	41	100
24	Sistem penggajian	15	27	47	11	100
25	Ketrampilan (skill) karyawan	8	11	38	43	100
26	Tata tertib kepegawaian	5	17	44	34	100
27	Sistem bonus	15	37	27	21	100
4. PROSES PRODUKSI						
28	Peralatan produksi	11	13	33	43	100
29	Sistem/metode proses produksi	11	10	34	45	100
30	Kapasitas produk	15	23	27	35	100
31	Pemenuhan permintaan pasar	23	41	27	9	100
32	Tingkat kegagalan produksi	3	23	42	32	100
33	Perkembangan desain	8	21	30	41	100
34	Kualitas produk yang dihasilkan	8	42	47	3	100
5. PEMASARAN						
35	Sistem promosi yang dimiliki	11	16	32	41	100
36	Tenaga pemasaran yang dimiliki	3	15	54	28	100
37	Luas pemesanan yang dicapai (market share)	11	18	45	26	100
38	Pertumbuhan tingkat penjualan yang dicapai	13	36	43	8	100
39	Langganan tetap yang dimiliki	9	33	47	11	100
40	Segmentasi pasar dimiliki	9	20	48	23	100

41	Event-event pameran yang pernah diikuti	15	20	30	35	100
42	Rencana pemasaran yang akan dicapai	15	28	52	5	100

Dari hasil wawancara dan kuesioner dengan menggunakan metode mix metode, diketahui bahwa IKM yang menggunakan mesin tradisional pembukuannya masih manual, sedangkan untuk IKM yang menggunakan mesin dengan teknologi canggih sudah menggunakan pembukuan yang tertata rapi. Pada awal berdirinya IKM Bordir di Kabupaten Demak menggunakan investasi yang minim, cash flow keuangan hanya dilakukan per transaksi, belum memikirkan keuntungan.

Kepersonaliaan hanya menggunakan tenaga kerja setempat

yang belum banyak ketrampilan membordir. Proses produksi bordir dibuat berdasarkan permintaan pasar saja, belum banyak yang menggunakan teknologi internet untuk membuat motif bordir Demak, sehingga model cenderung ketinggalan zaman untuk IKM yang menggunakan mesin manual. Pemasaran hasil border Demak hanya untuk kalangan terbatas sesuai permintaan pasar. Pemasaran paling banyak masih untuk kalangan pegawai negeri, pondok pesantren di Demak dan Semarang sekitarnya. Pemasaran paling jauh ke Kudus, itupun berdasarkan permintaan tertentu.

**Tabel 19**  
**Hasil Survey Dimensi Bordir**

Dimensi	SB	B	C	K
Keuangan	12	22	32	34
Pembukuan	6	21	48	27
Kepersonaliaan	8	19	39	34
Proses Produksi	11	25	34	30
Pemasaran	11	23	44	22

Sumber : Analisis Hasil Wawancara Kuesioner,2014

Strategi Rencana Umum Pengelolaan Investasi Kabupaten Demak Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai variabel secara sistematis untuk merumuskan strategi (Rangkuti, 2004). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strenghts) dan peluang (Opportunity), serta secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Dengan diketahui aspek aspek kondisi yang direncanakan untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi di dalam pengembangan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Demak.

Pengukuran indikator, pembobotan dan penskalaan variabel internal dan eksternal untuk keperluan analisis SWOT merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan ini.

### STRATEGI I

- Strategi Stable Growth Strategi ini digunakan untuk mempertahankan program yang ada, mengingat kekuatan dan peluang yang seimbang.
- Strategi Rapid Growth Startegi ini memanfaatkan semua peluang dengan memperkecil biaya, dengan tujuan untuk bertahan.

## STRATEGI II

- Strategi selective maintenance Strategi ini memilih secara selektif program yang akan dikembangkan. Sehingga diharapkan kelemahan dapat berkurang dan peluang dapat diraih.
- Strategi agresive maintenance Strategi ini digunakan untuk meningkatkan peluang dengan cara membuat program baru yang dapat meningkatkan daya dukung dari program yang sudah ada.

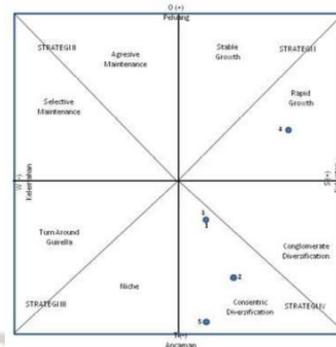
## STRATEGI III

- Strategi Turnaround dianjurkan pada saat daya tarik investasi tinggi walaupun sebenarnya mengalami kesulitan walaupun belum kritis. Cara yang perlu ditempuh adalah dengan mengembangkan program.
- Strategi Niche/Ceruk adalah strategi dengan sasaran penggalan segmen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan cara mengurangi hambatan.

## STRATEGI IV

- Strategi Concentric Diversification Strategi ini menambah produk atau jasa yang baru dan masih berhubungan.
- Strategi Conglomerate Diversification Strategi ini menambah produk atau jasa yang tidak saling berhubungan.

**Gambar 1**  
**Posisi Strategis**



Hasil Dari Analisis SWOT dapat disusun formuluasi strategi umum sebagai berikut

1. *Rapid Growth* = Dimensi Keuangan
2. *Stable Growth* = Dimensi Pembukuan
3. *Selective Maintenance* = Dimensi Personalia
4. *Turn around* = Dimensi Pemasaran
5. *Concentric Diversification* = Dimensi Proses Produksi

## STRATEGI PENGEMBANGAN INVESTASI IKM BORDIR DEMAK

Dalam menentukan strategi pengembangan investasi ada empat peranan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Demak yaitu *Pertama* entrepreneur, Pemerintah daerah bertanggung jawab menjalankan usaha bisnis melalui pengembangan usaha sendiri/BUMD sehingga aset-aset pemerintah daerah dapat dikelola lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan. *Kedua* koordinator, Pemerintah daerah menerapkan kebijakan atau mengusulkan strategi bagi pembangunan daerahnya. *Ketiga* fasilitator, Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui pengaturan penetapan daerah (zoning) yang lebih baik. *Keempat* stimulator, Pemerintah daerah dapat

menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi investor masuk ke Kabupaten Demak. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan cara antara lain : pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan outlet untuk produk industri kecil menengah, membantu industri kecil menengah melakukan pameran.

Sebelum menentukan strategi pengembangan investasi ada beberapa strategi lain yang diperlukan, dibagi menjadi 5 kelompok besar yaitu :

1) Strategi pengembangan fisik/lokalitas

Melalui program perbaikan kondisi fisik/lokalitas daerah ditujukan untuk pengembangan industri dan perdagangan, pemerintah daerah akan berpengaruh positif terhadap dunia usaha. Secara khusus tujuan pengembangan fisik/lokalitas adalah untuk menciptakan identitas Kabupaten Demak, memperbaiki daya tarik kota dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2) Strategi pengembangan dunia usaha, melalui :

- Pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha.
- Pembuatan informasi terpadu yang memudahkan masyarakat dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah untuk segala macam kepentingan seperti mengetahui masalah perizinan, rencana

pembangunan ekonomi daerah, ketersediaan lahan, ijin mendirikan bangunan.

- Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil.

- Pembuatan sistim pemasaran bersama untuk meningkatkan skala yang tidak ekonomis dalam produksi, meningkatkan daya saing produk-produk impor dan meningkatkan sikap kooperatif antar sesama pelaku bisnis.

- Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) dalam mengembangkan produk baru, pengembangan teknologi baru dan pencarian pasar baru.

3) Strategi pengembangan sumberdaya, melalui :

- Pelatihan dengan sistim customized training (pelatihan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan harapan si pemberi kerja)

- Pembuatan bank keahlian (skillbanks) berisi tentang keahlian dan latar belakang orang yang menganggur, informasi tentang jenis pekerjaan, informasi tentang keahlian yang digunakan untuk mengisi lowongan-lowongan kerja.

- Mendukung berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan dan ketrampilan (LPK) seperti : lembaga kursus komputer, membordir.

- Pengembangan lembaga pelatihan bagi penyandang cacat.
- 4) Strategi pengembangan sumberdaya, melalui pemberdayaan masyarakat. Seiring dengan proses peningkatan akses masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang sejalan dengan semangat otonomi daerah, maka kegiatan investasi program-program pembangunan perkotaanpun harus merupakan refleksi dari kemampuan masyarakat. Investasi yang dikembangkan dalam kegiatan pembangunan perkotaan harus bertumpu pada kemampuan masyarakat dalam pendanaan dan harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Program investasi yang dapat dilakukan berupa:
- a) Penanaman modal investasi produktif
  - b) Bantuan permodalan investasi
  - c) Modal kerja untuk pengembangan ekonomi kerakyatan
  - d) Pengembangan teknologi tepat guna
  - e) Pelatihan SDM guna peningkatan pengetahuan dan ketrampilan
  - f) Penyusunan studi-studi untuk menunjang dasar perencanaan
  - g) Pembinaan, pengaturan dan pengendalian, yang bersifat dan bertujuan untuk mengarahkan pembangunan kawasan dan sektor perkotaan oleh berbagai pelaku pembangunan.
- 5) Strategi Pengembangan Teknologi, SDM dan Pemasaran
- Program pengembangan teknologi, SDM dan pemasaran yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengembangan industri kecil menengah dan sentra Bordir yang ada di Kabupaten Demak.
- Pengembangan Teknologi
  - Pengenalan/sosialisasi teknologi pengolahan yang lebih baik.
  - Bantuan peralatan pengolahan bagi IKM Bordir Demak.
  - Fasilitasi pengembangan mutu.
  - Peningkatan kualitas SDM
  - Memberi bimbingan dan pelatihan teknis/keterampilan
  - peningkatan manajemen.
  - Sosialisasi peraturan-peraturan menyangkut IKM Bordir.
  - Sosialisasi penemuan balai-balai penelitian.
  - Fasilitasi Bantuan Permodalan melalui fasilitasi akses terhadap lembaga permodalan Bank/Non Bank.
  - Bantuan Pemasaran
  - Fasilitasi pendirian trading house.
  - Fasilitasi penyediaan informasi pasar dan peningkatan teknologi informasi.
  - Fasilitasi untuk mengikuti pameran.
  - Memfasilitasi Kerjasama/ Kemitraan, melalui fasilitasi kemitraan antara BUMN/ Swasta besar dengan IKM.
  - Iklim dan Sarana Usaha

- Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana usaha.
- Penyusunan dan peninjauan kembali kebijakan dan peraturan yang membantu IKM (penciptaan iklim usaha yang kondusif).
- Pemanfaatan hasil Litbang dan Peningkatan Mutu Produk
- Penyediaan jasa pengujian dan assessment mutu produk.
- Sosialisasi penemuan yang baru dari Balai-balai Litbang.

## SIMPULAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Demak terdiri dari 14 Kecamatan, adapun sentra IKM Bordir berada di 3 Kecamatan yaitu Bonang, Wedung dan Bonang. Ada 3 macam penggunaan mesin produksi Bordir Demak, yaitu mesin tradisional yang dikenal dengan isik, mesin juki dan mesin dengan teknologi canggih. IKM Bordir di Kabupaten Demak sangat berpotensi untuk dikembangkan. Untuk pengembangan IKM Bordir Demak diperlukan rencana investasi jangka pendek, menengah, dan panjang.

Rencana investasi jangka pendek 5 tahunan Rp.5.715.000.000; Jangka menengah 10 tahun Rp.38.432.000.000; Jangka Panjang 15 tahun Rp.258.461.000.000 dan 20 tahun Rp. 1.738.204.000.000. Ada 5 dimensi IKM Bordir Demak yang perlu dikembangkan, yaitu : Keuangan, Pembukuan, Kepersonaliaan, Proses Produksi dan Pemasaran. Dengan posisi strategi : *Rapid Growth* untuk Dimensi Keuangan; *Stable Growth* untuk Dimensi Pembukuan; *Selective Maintenance* untuk Dimensi Personalia ; *Turn around* untuk

Dimensi Pemasaran ; *Concentric Diversification* untuk dimensi Proses Produksi.

## Rekomendasi

Dalam meningkatkan Investasi KM Bordir Kabupaten Demak dilakukan berbagai kegiatan usaha berikut:

- a. Peningkatan penyuluhan ketrampilan atau pelatihan bagi pekerja,
- b. Pengembangan sarana penyuluhan, sedemikian hingga memungkinkan percepatan alih teknologi kepada masyarakat.
- c. Pengembangan paket teknologi berproduksi dan pemasaran.
- d. Pembinaan dan pengembangan sarana produksi.
- e. Pembinaan proses produksi, pembukuan, personalia dan pemasaran hasil produksi, melalui promosi dan distribusinya kepada konsumen.
- f. Pengembangan sarana dan prasarana IKM Bordir Demak
- g. Pemberian pinjaman lunak kepada para IKM Bordir Demak
- h. Menjalani kerjasama dengan pihak investor luar.
- i. Memperkenalkan produk hasil Bordir Demak lewat pameran daerah, brosur dan internet.

## Daftar Pustaka

Asmara, Anjal Anie. Pola Pemasaran Yang Efektif Untuk UKM. Makalah disampaikan pada Seminar UKM Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global, Yogyakarta, 2 Oktober 2004.

Bank Indonesia. *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*. 1995.

- BPS. Demak Dalam Angka 2010.
- BPS. Demak Dalam Angka 2011.
- BPS. Demak Dalam Angka 2012.
- BPS. Demak Dalam Angka 2013.
- Chandra, Purdi E. *Trik Bisnis Menuju Sukses*. Yogyakarta, CV. Grafika Indah, 2004.
- Chang, Willian. *Rakyat Kecil di Tengah Instabilitas Sosial. Masyarakat Versus Negara*. Kompas, Jakarta, 2002.
- Endang, Sri Nuryani. "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Menghadapi Pasar Global." Makalah disampaikan pada Seminar UKM Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global, Yogyakarta, 2 Oktober 2004.
- Ernawati. *Upaya Meningkatkan Peran UMKM*. *Warta Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)*, Jakarta, Edisi Oktober Bappenas, UNDP, UNHABITAT, 2002.
- Fakih, Mansour. *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*. Yogyakarta, Insist Press, 2003.
- Hakim, Saeful. Ernastuti, Dyah R. Panuju, dkk, 2002. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta : Crepest Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : AMP YKPN.
- Hasanullah. "Peranan PPUK Bank Indonesia Dalam Pemberian KUK oleh Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Magister Manajemen*. No. 26, Jakarta, Badan Penerbit IPWI, 1997.
- Iqbal, Mohammad. M Simanjuntak, Krisni. *Solusi Jitu Bagi Pengusaha Kecil Dan Menengah*. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2004.
- Jurnal Koperasi & UMKM, Tabloid kerjasama Bisnis Indonesia dengan kementerian Negara Koperasi dan UMKM, edisi VI/ Oktober 2008.
- Ketetapan MPR Nomor XVI Tahun 1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
- Mardiyasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP RI No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
- Prawirosentono, Suryadi. *Strategi Pengambilan Keputusan Bisnis*. Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2002.
- Rangkuti, Freddy. *Analisa SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta, PT. SUN, 2000.
- Retnadi, Djoko. *Menengok Kebijakan UMKM di Malaysia*. Kompas. 16 Oktober 2004.
- Sarosa, Pietra. "Kiat Praktis Membuka Usaha." Jakarta, PT. Gramedia, 2004.
- Team Work Lapera. "Politik Pemberdayaan." Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama, 2000.
- Toha, Mahmud. "Indonesia Menapak Abad 21". *Kajian Ekonomi Politik*. Kumpulan Tulisan Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan

- (IPSK)-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Millenium Publisher. 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Usman, Sunyoto. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Widjaja, A.W. 1992. Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Widjaja, A.W. 2001. Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU. No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta : PT. Raja Garafindo Persada.
- Widodo, Tri. Strategi Pengolahan Sumber Modal UKM. Makalah Disampaikan pada Seminar UKM Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global, Yogyakarta, 2 Oktober 2004.